

STRATEGI PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BUMBU)

Hasnah¹, Yanuar Bactiar²

Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan,
Banjarmasin^{1,2}

e-mail: hasnah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Diterima: 16/7/2026; Direvisi: 1/8/2026; Diterbitkan: 11/9/2026

ABSTRAK

Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya berkaitan dengan besarnya penerimaan, tetapi dengan kemampuan daerah mengenali sumber yang layak dipertahankan, diperkuat, atau dikembangkan. Penelitian ini menganalisis strategi pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dengan memetakan karakter penerimaan, menilai kinerja pemungutan, dan mengidentifikasi peluang sumber retribusi baru. Pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif digunakan dengan memadukan data primer dan sekunder. Tipologi Klassen digunakan untuk membaca posisi jenis PDRD berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya, analisis target-realisisasi digunakan untuk menilai kinerja penerimaan, sedangkan *feasibility study* diterapkan pada alternatif retribusi baru. Selama periode pengamatan, PDRD tumbuh rata-rata 10,5% per tahun, lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan sebesar 5,4%. Pemetaan menghasilkan tiga pajak unggulan, tiga berkembang, dan lima yang memerlukan perhatian khusus; pada retribusi terdapat dua unggulan, satu potensial, empat berkembang, dan sepuluh terbelakang. Kajian juga menemukan peluang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Rumah Potong Unggas dan Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Temuan ini mengarah pada strategi PAD yang memadukan prioritas sumber penerimaan, pembenahan pengelolaan, dan pengembangan sumber baru secara selektif, berbasis data dan kesiapan kelembagaan.

Kata Kunci: *Potensi Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tipologi Klassen*

ABSTRACT

Strengthening Regional Original Revenue (PAD) in Tanah Bumbu Regency is not merely a matter of increasing revenue, but also of enabling the region to identify sources that should be maintained, strengthened, or developed. This study analyzes strategies for utilizing economic potential to increase PAD through the optimization of Regional Taxes and Regional Levies (PDRD) by mapping revenue characteristics, assessing collection performance, and identifying opportunities for new levy sources. A descriptive qualitative and quantitative approach was employed by combining primary and secondary data. The Klassen Typology was used to examine the position of PDRD types based on their growth and contribution, target-realization analysis was applied to assess revenue performance, while a *feasibility study* was conducted to evaluate alternative new levy sources. During the observation period, PDRD grew by an average of 10.5% annually, exceeding the average growth of other regencies/cities in South Kalimantan at 5.4%. The mapping identified three leading tax types, three developing types, and five requiring special attention; among levies, there were two leading, one potential, four developing, and ten underdeveloped types. The study also identified opportunities for Business

Service Levy for Poultry Slaughterhouses and Certain Licensing Levy for the Employment of Foreign Workers. These findings point to a PAD strategy that integrates revenue-source prioritization, management improvement, and selective development of new sources based on data and institutional readiness.

Keywords: *Regional Economic Potential, Locally Generated Revenue, Local Taxes, Local Retributions, Klassen Typology*

PENDAHULUAN

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah aktivitas ekonomi menjadi sumber pembiayaan publik menjadi salah satu persoalan yang semakin nyata dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Kewenangan yang lebih luas atas pendapatan daerah membuka ruang bagi pemerintah lokal untuk menentukan sendiri sumber penerimaan yang dapat dipertahankan, diperkuat, atau dikembangkan sesuai dengan karakter wilayahnya. Dalam perspektif tersebut, desentralisasi pendapatan tidak hanya berkaitan dengan perpindahan kewenangan fiskal, tetapi juga dengan kemampuan institusi daerah mengelola sumber daya yang tersedia agar menghasilkan kapasitas pembiayaan yang berkelanjutan. Muthomi dan Ndunda (2024) memperlihatkan keterkaitan antara reformasi desentralisasi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, sementara Kharel dan Rodríguez-Pose (2025) menemukan bahwa devolusi memiliki hubungan dengan ketahanan ekonomi wilayah. Kedua perspektif tersebut mengarahkan perhatian pada satu persoalan yang lebih substantif, yakni bagaimana kewenangan fiskal diterjemahkan menjadi kemampuan nyata daerah dalam membangun basis pendapatan yang dapat menopang kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut dapat dilihat melalui posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kapasitas daerah dalam membiayai sebagian kebutuhan pemerintahannya melalui sumber yang berada di wilayah sendiri. Struktur PAD tidak berdiri pada satu jenis penerimaan, melainkan terbentuk dari beberapa komponen dengan karakteristik dan tingkat pengembangan yang berbeda. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi bagian yang dapat dipengaruhi melalui kebijakan pemungutan, pembaruan basis data, kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal. Kusuma dan Iskandar (2022) menemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan daerah lainnya berkaitan dengan pembentukan PAD, sedangkan Zakiah (2022) menghubungkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan PAD dengan indeks kemandirian fiskal. Dengan demikian, kapasitas PAD lebih tepat dipahami sebagai hasil dari kemampuan mengelola beragam sumber penerimaan daripada sekadar pencapaian angka pendapatan pada suatu periode.

Kabupaten Tanah Bumbu memberikan konteks empiris yang menarik karena kekuatan penerimaannya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan posisi PAD dalam struktur pendapatan daerah. Secara nominal, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berada relatif tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, dengan pertumbuhan PDRD rata-rata sekitar 10,5% per tahun. Angka pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lain yang berada pada kisaran 5,4%, tetapi keunggulan tersebut belum secara otomatis menghasilkan peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam proporsi yang sebanding. Situasi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pertumbuhan penerimaan dan penguatan kapasitas fiskal, sehingga ukuran nominal maupun laju pertumbuhan belum memadai untuk menjelaskan sejauh mana potensi ekonomi Tanah Bumbu telah berhasil dikonversi menjadi PAD. Atas dasar itu, persoalan yang perlu ditelaah

bukan hanya berapa besar penerimaan yang diperoleh, tetapi juga sumber mana yang memiliki ruang pengembangan dan kondisi apa yang menentukan keberhasilannya.

Perbedaan karakter antarjenis penerimaan membuat pemetaan menjadi relevan ketika strategi peningkatan PAD hendak dirumuskan secara lebih terarah. Fajrussani et al. (2025) memetakan potensi pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat, sementara Dewi et al. (2025) menggunakan efektivitas dan kontribusi pajak daerah untuk mengevaluasi kemampuannya dalam mendukung PAD. Rahma et al. (2026) juga mengkaji kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Jombang selama 2020–2025, sedangkan Akib et al. (2023) menempatkan optimalisasi pajak dan retribusi sebagai strategi peningkatan PAD. Ragam pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kondisi penerimaan tidak dapat diperlakukan secara seragam karena setiap jenis pungutan memiliki posisi, perkembangan, dan peluang pengelolaan yang berbeda. Bagi Tanah Bumbu, kebutuhan analisisnya kemudian mengarah pada upaya menemukan ruang fiskal yang masih tersedia di antara sumber penerimaan yang sudah kuat, sumber yang sedang berkembang, dan sumber yang belum memberikan kontribusi optimal.

Dimensi pengelolaan menjadi semakin penting ketika kapasitas penerimaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan objek pajak atau retribusi. Agyapong et al. (2022) memperlihatkan bahwa mobilisasi pendapatan domestik dalam sistem desentralisasi berhadapan dengan persoalan kelembagaan, sehingga kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan turut dipengaruhi oleh kualitas institusi yang menjalankan proses tersebut. Bucci et al. (2024) juga menemukan hubungan antara efisiensi belanja pemerintah lokal dan desentralisasi fiskal pada pemerintah kota di Italia, yang memberi gambaran bahwa kapasitas fiskal perlu ditempatkan bersama dengan kualitas pengelolaan sumber daya publik. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa potensi ekonomi yang besar belum tentu menghasilkan penerimaan optimal apabila pendataan, mekanisme pemungutan, koordinasi, kompetensi aparatur, dan pengambilan keputusan belum berjalan secara memadai. Karena itu, pembacaan terhadap PAD Tanah Bumbu perlu mempertemukan kondisi penerimaan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber tersebut.

Ruang kajian yang masih perlu diperjelas terletak pada hubungan antara posisi suatu sumber penerimaan dalam perkembangan fiskal dengan kelayakannya untuk dijadikan sasaran pengembangan. Pengukuran efektivitas, kontribusi, atau pertumbuhan dapat menggambarkan kinerja penerimaan, tetapi belum selalu menjawab sumber mana yang sebaiknya memperoleh prioritas ketika pemerintah daerah menyusun strategi PAD pada periode berikutnya. Fajrussani et al. (2025) memberikan dasar melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi, sedangkan Akib et al. (2023) menekankan optimalisasi sebagai strategi peningkatan PAD; penelitian ini memperluas ruang tersebut dengan mempertemukan pemetaan makro menggunakan Tipologi Klassen dan penilaian mikro melalui *feasibility study*. Kombinasi tersebut memungkinkan posisi setiap jenis PDRD dibaca bersamaan dengan peluang pengembangannya, termasuk kemungkinan menghadirkan sumber retribusi yang belum menjadi bagian dari penerimaan berjalan. Dengan pendekatan demikian, klasifikasi penerimaan tidak berhenti sebagai hasil statistik, melainkan digunakan untuk menelusuri arah intervensi yang lebih sesuai dengan karakter fiskal Kabupaten Tanah Bumbu.

Penelitian ini kemudian diarahkan untuk menganalisis strategi pemanfaatan potensi ekonomi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Analisis dilakukan dengan memetakan jenis PDRD berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya melalui Tipologi Klassen, menilai kinerja penerimaan dengan membandingkan target dan realisasi, serta mengidentifikasi

peluang pengembangan sumber retribusi baru menggunakan *feasibility study*. Rangkaian tersebut digunakan untuk membedakan sumber penerimaan yang telah memiliki posisi kuat, sumber yang masih membutuhkan penguatan, dan sumber yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengelolaannya. Selain itu, kajian terhadap alternatif retribusi baru diarahkan untuk melihat apakah masih terdapat ruang penerimaan yang dapat dikembangkan dari kebutuhan layanan dan aktivitas ekonomi daerah. Hasil keseluruhan analisis selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih spesifik terhadap karakteristik potensi dan kondisi pengelolaan PDRD di Kabupaten Tanah Bumbu.

METODE PENELITIAN

Kabupaten Tanah Bumbu menjadi ruang kajian untuk menelusuri hubungan antara potensi ekonomi daerah dan kemampuan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggabungkan informasi kualitatif dan kuantitatif, sehingga kondisi penerimaan dapat dibaca melalui data angka sekaligus keterangan mengenai praktik pengelolaannya. Cakupan objek meliputi seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut pemerintah daerah, disertai penelaahan terhadap dua alternatif sumber retribusi baru, yakni Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Rumah Potong Unggas (RPU) dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA). Informasi lapangan diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan perangkat daerah terkait, survei terhadap objek pajak dan retribusi, wawancara individual, serta pertemuan terbatas dengan pihak yang berwenang dalam pengelolaan PDRD. Data tersebut kemudian diperkaya dengan dokumen target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan periode 2019–2023, serta berbagai dokumen kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan PDRD.

Pemaknaan terhadap data dilakukan dengan mempertemukan informasi mengenai posisi penerimaan, pelaksanaan pemungutan, dan kemungkinan pengembangan sumber pendapatan. Posisi setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditelusuri menggunakan Tipologi Klassen dengan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusinya terhadap total penerimaan PDRD, kemudian ditempatkan ke dalam kategori unggulan/prima, berkembang, potensial, atau terbelakang. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dibaca bersama kinerja pemungutan melalui perbandingan target dan realisasi penerimaan, dasar pengenaan pajak atau retribusi, potensi yang telah teridentifikasi, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutannya. Untuk dua alternatif sumber retribusi baru, yaitu RPU dan PTKA, dilakukan *feasibility study* dengan memperbandingkan kebutuhan atau potensi layanan dengan biaya dan manfaat penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Keseluruhan tahapan tersebut diarahkan untuk memetakan pungutan yang telah berjalan sekaligus menemukan alternatif sumber PAD baru, tanpa memperluas interpretasi melampaui temuan yang diperoleh dari data penelitian.

Keterandalan informasi dijaga dengan memperbandingkan keterangan yang berasal dari berbagai sumber melalui triangulasi sumber data. Langkah ini diperlukan karena data sekunder mengenai realisasi PDRD terutama menggambarkan pencapaian penerimaan terhadap target, sehingga belum secara langsung mencerminkan seluruh potensi riil yang dapat dihimpun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, informasi dalam dokumen dikaji berdampingan dengan hasil FGD, survei, wawancara, dan pertemuan bersama pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan PDRD. Setiap informasi kemudian ditelaah kesesuaiannya dengan kebutuhan

analisis, terutama untuk memperoleh gambaran mengenai klasifikasi potensi PDRD, kondisi pelaksanaan pemungutan, dan kelayakan dua alternatif sumber retribusi baru. Proses tersebut menghasilkan pembacaan yang tidak hanya bertumpu pada capaian penerimaan, tetapi juga memasukkan kondisi lapangan serta dokumen kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan PDRD di Kabupaten Tanah Bumbu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Tanah Bumbu secara nominal berada di atas rata-rata sebelas kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Laju pertumbuhan PDRD Kabupaten Tanah Bumbu tercatat rata-rata sebesar 10,5% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan kabupaten/kota lainnya sebesar 5,4% per tahun. Pada analisis Tipologi Klassen tingkat regional periode 2019–2023, Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kuadran prima bersama Kota Banjarmasin. Pada periode tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB yang tergolong tinggi, dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer.

Analisis Tipologi Klassen selanjutnya dilakukan terhadap jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berjalan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil klasifikasi tersebut menghasilkan tiga kelompok Pajak Daerah, yaitu kelompok unggulan, berkembang, dan perlu perhatian khusus, serta empat kelompok Retribusi Daerah, yaitu unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang. Rincian jenis pungutan yang termasuk dalam setiap kelompok disajikan pada Tabel 1. Penyajian tersebut digunakan untuk memperlihatkan posisi masing-masing jenis pungutan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian.

Tabel 1. Klasifikasi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Jenis Pungutan	Klasifikasi	Jenis Pajak/Retribusi yang Teridentifikasi
Pajak Daerah	Unggulan	PBJT Makanan/Minuman; PBJT Tenaga Listrik; Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Daerah	Berkembang	PBB-P2; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak MBLB
Pajak Daerah	Perlu Perhatian Khusus	Pajak Reklame; BPHTB; PBJT Jasa Perhotelan; PBJT Jasa Parkir; PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
Retribusi Daerah	Unggulan	Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Daerah	Potensial	Retribusi Pelayanan Kebersihan
Retribusi Daerah	Berkembang	Retribusi Tempat Pelelangan; Rumah Potong Hewan; Penjualan Produksi Usaha Daerah; Pemanfaatan Aset Daerah
Retribusi Daerah	Terbelakang	10 jenis, antara lain Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Pengendalian Lalu Lintas, dan Persetujuan Bangunan Gedung

Berdasarkan Tabel 1, terdapat tiga jenis Pajak Daerah yang diklasifikasikan sebagai unggulan, tiga jenis termasuk kelompok berkembang, dan lima jenis berada pada kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Pada Retribusi Daerah, dua jenis termasuk kelompok unggulan, satu jenis termasuk kelompok potensial, empat jenis termasuk kelompok

berkembang, dan sepuluh jenis termasuk kelompok terbelakang. Selain klasifikasi terhadap pungutan yang telah berjalan, penelitian juga mengidentifikasi dua alternatif sumber retribusi baru, yaitu Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Rumah Potong Unggas (RPU) dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA). Dengan demikian, hasil analisis mencakup pemetaan pungutan yang telah tersedia sekaligus identifikasi alternatif sumber penerimaan baru.

Hasil identifikasi terhadap pelaksanaan pemungutan PDRD juga mencatat tiga persoalan administratif yang ditemukan selama penelitian. Pertama, koordinasi antar-SKPD masih menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan pemungutan, disertai kondisi basis data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum termutakhirkan. Kedua, BAPENDA belum memiliki strategi prioritas sektor yang dinyatakan secara eksplisit dan belum memiliki SOP teknis pemungutan sebagai pedoman operasional. Ketiga, kompetensi teknis SDM dalam bidang penilaian, penagihan, dan pemeriksaan masih perlu diperkuat. Ketiga temuan tersebut dicatat sebagai hasil identifikasi kondisi pengelolaan PDRD di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada pengembangan sumber PAD baru, studi kelayakan mengidentifikasi RPU dan PTKA sebagai dua jenis retribusi yang berpotensi dikembangkan. Hasil kajian terhadap RPU mencatat adanya kebutuhan layanan pemotongan unggas yang higienis seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi lokal. Sementara itu, PTKA diidentifikasi sebagai jenis retribusi yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Tanah Bumbu. Kedua hasil identifikasi tersebut menjadi bagian dari temuan penelitian mengenai alternatif pengembangan sumber PAD baru.

Pembahasan

Kekuatan ekonomi daerah tidak selalu bergerak dalam arah yang sama dengan penguatan kapasitas fiskalnya. Kabupaten Tanah Bumbu memperlihatkan situasi tersebut melalui pertumbuhan PDRD yang mencapai rata-rata 10,5% per tahun, lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan yang berada pada 5,4%, tetapi peningkatan tersebut belum diikuti penguatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah secara berarti. Perbedaan antara dua perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan penerimaan secara nominal belum dapat diperlakukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan pengelolaan fiskal. Dalam kerangka desentralisasi, yang menjadi persoalan bukan hanya kemampuan pemerintah daerah memperoleh penerimaan, melainkan kapasitas untuk mengubah aktivitas ekonomi lokal menjadi sumber pembiayaan yang mampu bertahan dan berkembang. Aritenang dan Chandramidi (2023) menempatkan desentralisasi fiskal dalam dinamika pertumbuhan dan konvergensi wilayah, sedangkan Marhamah dan Harsono (2025) menggunakan PAD sebagai salah satu cara membaca kemandirian keuangan daerah; hasil Tanah Bumbu memberikan nuansa tambahan bahwa kedua aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh cara pemerintah daerah mengelola sumber penerimaannya. Amanda dan Murwiati (2025) juga menghubungkan PAD dengan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, tetapi temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan tersebut perlu dilihat sampai pada tingkat pengelolaan masing-masing sumber penerimaan.

Cara membaca kondisi tersebut menjadi lebih tajam ketika PDRD tidak diperlakukan sebagai satu kelompok yang homogen. Pertumbuhan agregat ternyata menyembunyikan perbedaan posisi antarjenis pungutan, sehingga sumber dengan penerimaan besar belum tentu menjadi sumber yang paling tepat untuk diprioritaskan dan sumber dengan kontribusi lebih kecil tidak serta-merta kehilangan peluang pengembangan. Dantes dan Lasminiasih (2021) memperlihatkan bahwa efektivitas suatu pajak tidak selalu berjalan searah dengan

kontribusinya terhadap PAD, sementara Ahmadi dan Harsono (2025) menemukan bahwa kontribusi dan efektivitas penerimaan dipengaruhi pula oleh kondisi ekonomi, regulasi, dan kepatuhan. Pola tersebut memperoleh konteks empiris di Tanah Bumbu melalui keberadaan tiga kelompok pajak, yaitu unggulan, berkembang, dan yang memerlukan perhatian khusus, serta empat kelompok retribusi yang terdiri atas unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang. Prasetyo dan Santoso (2026) menekankan perlunya membaca kontribusi dan efektivitas pajak serta retribusi secara lebih spesifik, sedangkan Dumbi et al. (2025) menegaskan bahwa peningkatan PAD perlu mempertimbangkan karakter masing-masing jenis pajak. Dengan demikian, heterogenitas penerimaan bukan sekadar variasi statistik, melainkan dasar untuk menentukan bahwa intervensi pengelolaan harus dibedakan menurut posisi dan persoalan yang melekat pada setiap sumber.

Pada titik inilah Tipologi Klassen memberikan nilai analitis yang lebih besar daripada sekadar pengelompokan jenis penerimaan. Dengan mempertemukan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi terhadap total PDRD, pendekatan tersebut membantu memperlihatkan sumber yang memiliki perkembangan sekaligus posisi relatif kuat dan sumber yang memerlukan perlakuan berbeda. Di Tanah Bumbu, pemetaan menghasilkan tiga jenis pajak dalam kelompok unggulan, tiga jenis berkembang, dan lima jenis yang memerlukan perhatian khusus, sementara retribusi tersebar pada kelompok unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang. Darmawan dan Asmarawati (2026) menunjukkan bahwa teknik Klassen dapat digunakan untuk membedakan posisi pajak daerah menurut karakteristik perkembangannya, sedangkan temuan Ahmadi dan Harsono (2025) serta Prasetyo dan Santoso (2026) memberikan dasar untuk menggunakan karakteristik penerimaan dalam menentukan prioritas. Namun, makna klasifikasi tersebut dalam penelitian ini terletak pada penggunaannya sebagai dasar membaca arah pengelolaan, bukan hanya sebagai pemberian label terhadap performa penerimaan. Sumber yang telah berada pada posisi kuat dapat diarahkan untuk dipertahankan dan diintensifkan, sumber berkembang membutuhkan penguatan basis penerimaan, sedangkan kelompok yang lemah memerlukan evaluasi lebih selektif agar sumber daya pengelolaan tidak tersebar tanpa prioritas yang jelas.

Klasifikasi tersebut sekaligus membuka persoalan yang tidak dapat dijelaskan oleh angka pertumbuhan dan kontribusi saja, yakni mengapa potensi yang tersedia belum sepenuhnya berubah menjadi penerimaan aktual. Temuan lapangan memperlihatkan adanya persoalan pada basis data wajib pajak dan wajib retribusi yang belum mutakhir, koordinasi antar-SKPD, belum adanya strategi prioritas sektor dan SOP teknis pemungutan yang dinyatakan secara eksplisit, serta kompetensi teknis aparatur dalam penilaian, penagihan, dan pemeriksaan. Rangkaian kondisi tersebut memperlihatkan bahwa jarak antara potensi dan realisasi bukan semata persoalan ketersediaan objek penerimaan, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi untuk mengenali, mengadministrasikan, memungut, dan mengawasi sumber tersebut. Vicoresita (2026) menempatkan hambatan pengelolaan sebagai bagian dari persoalan optimalisasi pajak dan retribusi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sedangkan Hasanah et al. (2025) menekankan pendataan, pemungutan, dan penguatan kinerja kelembagaan Bapenda dalam peningkatan PAD. Essel (2025) memperluas perspektif tersebut dengan mengaitkan mobilisasi pendapatan daerah dengan kapasitas administrasi, mekanisme pemungutan, teknologi, kompetensi aparatur, dan kebijakan. Dalam konteks Tanah Bumbu, temuan-temuan tersebut membantu menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan yang tinggi dapat berjalan berdampingan dengan ruang fiskal yang belum sepenuhnya tergarap apabila kapasitas pengelolaannya belum mengikuti perkembangan basis ekonomi daerah.

Persoalan tersebut mengubah cara pertumbuhan PDRD perlu dimaknai. Angka 10,5% per tahun memang memperlihatkan perkembangan penerimaan yang kuat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan 5,4% pada kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, tetapi angka tersebut tidak dengan sendirinya mengindikasikan tercapainya kemandirian fiskal. Ketika proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah belum mengalami perubahan yang sebanding, pertumbuhan penerimaan lebih tepat dibaca sebagai kapasitas yang tersedia daripada sebagai kondisi optimal yang telah dicapai. Dalam pengertian ini, potensi ekonomi Tanah Bumbu telah menghasilkan basis fiskal yang cukup kuat, tetapi proses transformasinya menjadi PAD masih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola penerimaan. Aritenang dan Chandramidi (2023) memperlihatkan keterkaitan kapasitas fiskal dengan dinamika pembangunan wilayah, sedangkan Marhamah dan Harsono (2025) menempatkan PAD dalam pengukuran kemandirian keuangan daerah; temuan penelitian ini mempertemukan kedua perspektif tersebut dengan menunjukkan adanya celah antara pertumbuhan penerimaan dan penguatan posisi fiskal. Amanda dan Murwiati (2025) menghubungkan PAD dengan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal, sementara kasus Tanah Bumbu memperlihatkan bahwa pengaruh kondisi ekonomi terhadap kapasitas fiskal perlu dipahami bersama mekanisme administratif yang menentukan seberapa jauh potensi tersebut benar-benar dapat dihimpun.

Ruang fiskal yang tersedia juga tidak hanya berada pada pungutan yang sudah berjalan. Hasil *feasibility study* mengidentifikasi Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Rumah Potong Unggas dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai dua alternatif sumber yang berpotensi dikembangkan. Kehadiran kedua alternatif tersebut memperluas makna optimalisasi karena pemerintah daerah tidak hanya dituntut memperbaiki kinerja sumber lama, tetapi juga perlu menilai secara hati-hati peluang penerimaan yang muncul dari kebutuhan layanan dan aktivitas ekonomi daerah. Fajrussani et al. (2025) menunjukkan bahwa pemetaan potensi pajak dan retribusi dapat membantu membedakan sumber yang masih memiliki ruang pengembangan dari sumber yang relatif optimal, sedangkan penelitian ini membawa pemetaan tersebut ke tahap berikutnya dengan memasukkan penilaian kelayakan terhadap sumber penerimaan baru. Akib et al. (2023) menempatkan optimalisasi pajak dan retribusi sebagai strategi peningkatan PAD, dan temuan Tanah Bumbu memperluas gagasan tersebut melalui dua jalur yang berjalan bersamaan: intensifikasi terhadap sumber yang telah tersedia dan eksplorasi selektif terhadap sumber yang belum dimanfaatkan. Namun, peluang tersebut tidak semestinya dipahami sebagai penambahan jenis pungutan secara otomatis, sebab kelayakan layanan, manfaat, biaya penyelenggaraan, dan kesiapan pengelolaan tetap menjadi pertimbangan sebelum suatu alternatif dikembangkan.

Jika seluruh temuan tersebut ditempatkan dalam satu kerangka, strategi PAD Tanah Bumbu tidak tepat dibangun melalui satu resep yang berlaku untuk seluruh jenis penerimaan. Pemetaan menunjukkan adanya perbedaan posisi, evaluasi pengelolaan memperlihatkan adanya hambatan kelembagaan, sedangkan *feasibility study* membuka kemungkinan perluasan basis penerimaan; ketiganya saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa pertumbuhan PDRD yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan penguatan kapasitas fiskal. Akib et al. (2023), Fajrussani et al. (2025), Vicoresita (2026), Hasanah et al. (2025), dan Essel (2025) sama-sama memberi perhatian pada optimalisasi, pemetaan, kelembagaan, dan mobilisasi pendapatan, sementara penelitian ini mempertemukan dimensi tersebut dalam konteks Kabupaten Tanah Bumbu. Konsekuensinya, sumber unggulan memiliki kebutuhan pengelolaan yang berbeda dari sumber berkembang, demikian pula sumber yang memerlukan perhatian khusus tidak dapat diperlakukan dengan strategi yang sama seperti sumber yang memiliki prospek pengembangan. Penguatan pendataan, koordinasi antar-SKPD, mekanisme pemungutan, SOP, dan kompetensi



aparatur menjadi bagian yang menentukan agar klasifikasi potensi dapat diterjemahkan menjadi tindakan pengelolaan. Pada saat yang sama, alternatif retribusi baru perlu ditempatkan dalam kerangka seleksi berbasis kelayakan dan kesiapan kelembagaan. Dengan demikian, optimalisasi PAD di Tanah Bumbu lebih mencerminkan proses pengambilan keputusan yang menghubungkan informasi tentang potensi, kinerja penerimaan, kondisi kelembagaan, dan peluang pengembangan sumber baru secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan pilihan pengelolaan yang disesuaikan dengan posisi dan prospek setiap sumber penerimaan. Tipologi Klassen menempatkan tiga jenis pajak sebagai unggulan, tiga jenis berkembang, dan lima jenis yang memerlukan perhatian khusus, sementara pada kelompok retribusi terdapat dua jenis unggulan, satu potensial, empat berkembang, dan sepuluh terbelakang. Di luar sumber yang telah berjalan, penelitian menemukan dua alternatif yang layak dikaji lebih lanjut, yaitu Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Rumah Potong Unggas dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan PAD tidak cukup ditempuh melalui peningkatan penerimaan yang sudah tersedia, tetapi membutuhkan pemilahan prioritas, pembenahan pengelolaan, dan pertimbangan kelayakan terhadap sumber baru. Arah strateginya adalah menjaga sumber yang telah kuat, mendorong sumber yang masih berkembang, menata kembali sumber yang belum optimal, serta membuka ruang penerimaan baru secara selektif sesuai kapasitas pengelolaannya.

Implikasi penelitian bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terletak pada perlunya menjadikan pemetaan potensi sebagai dasar penetapan prioritas pengelolaan PDRD, bukan sekadar sebagai gambaran kondisi penerimaan. Penguatan pendataan, koordinasi antar-SKPD, mekanisme pemungutan, SOP, dan kompetensi aparatur perlu berjalan bersama dengan penetapan target yang berbasis data serta evaluasi berkala agar strategi yang diterapkan dapat dikoreksi ketika kinerjanya tidak sesuai harapan. Dua alternatif retribusi baru juga perlu melalui penilaian kelayakan dan kesiapan kelembagaan sebelum diposisikan sebagai sumber PAD. Pada tahap berikutnya, penelitian dapat menguji perubahan tingkat kemandirian fiskal setelah strategi optimalisasi diterapkan dan membandingkan efektivitas pendekatan tersebut dengan daerah lain yang memiliki karakteristik basis ekonomi serupa. Pendekatan longitudinal atau komparatif juga dapat memberikan gambaran yang lebih kuat mengenai apakah peningkatan penerimaan mampu bertahan sekaligus memperbaiki struktur pendapatan daerah dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, N., Choiriyah, N., Hanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Analisis pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Malang. *Journal Social Society*, 6(3), 1721–1742. <https://pusdig.my.id/jss/article/view/1355>
- Agyapong, A., Sanyare, F. N., & Wedam, E. A. (2022). Domestic revenue mobilization: Institutional challenges in Ghana's decentralization system. In *Democratic decentralization, local governance and sustainable development: Ghana's experiences for policy and practice in developing countries* (pp. 155–171). Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-12378-8_9



- Ahmadi, S., & Harsono, I. (2025). Analisis potensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Mataram. *Ganec Swara*, 19(1), 252–265. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.213>
- Akib, M. R., Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 126–138. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2238>
- Amanda, S., & Murwiati, A. (2025). Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, inflasi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia tahun 2010–2023. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 13–26. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2228>
- Aritenang, A. F., & Chandramidi, A. N. (2023). The spatial effects of fiscal decentralization on regional convergence: The case of regions in Indonesia. *GeoJournal*, 88(2), 2011–2030. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148123002136>
- Bucci, V., Ferrara, G., & Resce, G. (2024). Local government spending efficiency and fiscal decentralization: Evidence from Italian municipalities. *Applied Economics*, 56(5), 599–614. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2023.2169241>
- Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017–2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2165513>
- Darmawan, Y., & Asmarawati, B. (2026). Analisis potensi pajak daerah menggunakan teknik analisis Klassen: Studi kasus Kabupaten Blora tahun 2022–2024. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 29(2), 293–304. <https://doi.org/10.35591/wahana.v29i2.1012>
- Dewi, S., Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2025). Efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 27(2), 317–327. <http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/2216>
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 271–285. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.164>
- Essel, R. E. (2025). Revenue mobilization channels and strategies and local government performance in Ghana: Implications for fiscal sustainability of the North Tongu District Assembly. *Journal of Contemporary Business Research*, 1(1), 56–75. <https://doi.org/10.1177/3049513X251330014>
- Fajrussani, S., Wahyunadi, W., & Sriningsih, S. (2025). Analisis pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018–2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3), 49–64. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i3.319>
- Hasanah, A. A. N., Aisyah, A. S. N., Fateha, A. A., & Kurniawan, Z. Z. A. (2025). Strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi di Bapenda Kabupaten Jember. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 37–48. <https://journal.manarulilmi.org/index.php/jse/article/view/41>
- Kharel, R., & Rodríguez-Pose, A. (2025). Devolution and economic resilience in Nepal. *World Development*, 195, Article 107154. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107154>



- Kusuma, M. S. R., & Iskandar, D. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Advance: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 30–40. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3169797>
- Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah di Kota Mataram tahun 2018–2023. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 349–360. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699>
- Muthomi, F., & Ndunda, T. M. (2024). The nexus between revenue decentralization reforms and economic growth. *Public Budgeting & Finance*, 44(3), 44–60. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12370>
- Prasetyo, A. S., & Santoso, A. (2026). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta tahun 2021–2024. *Jurnal Projemen UNIPA*, 13(2), 17–33. <https://doi.org/10.59603/projemen.v13i2.1345>
- Rahma, A. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang tahun 2020–2025. *Journal Social Society*, 6(2), 1404–1415. <https://pusdig.my.id/jss/article/view/1281>
- Vicoresita, C. (2026). Analisis penghambat dan strategi optimalisasi pajak serta retribusi daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022: Pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. *Good Governance and Public Policy*, 1(1), 1–9. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/govpublic/article/view/25414>
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2016–2020. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2). <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137>